

Penguatan Pesantren di Era Otonomi*

Darodjat Kadarisman**

Abstrak

Desentralisasi pendidikan yang mulai digulirkan pada tahun 2003 dianggap banyak kalangan mampu menyelesaikan permasalahan bangsa yang berakar pada rendahnya kualitas pendidikan. Telah terbukti bahwa pemerintahan yang sentralistik tidak dapat memberdayakan masyarakat dan justru akan mematikan kreatifitas dan partisipasi masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada rendahnya mutu pendidikan di daerah.

Artikel ini melihat bahwa pesantren, yang sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, memiliki cara tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era otonomi. Depag yang menjadi payung madrasah, merupakan salah satu departemen yang tidak masuk dalam wilayah otonomi. Sehingga bisa dimaklumi jika kaum santri saat ini lebih memilih jalur sekolah dalam mengembangkan lembaganya. Pemilihan jalur sekolah, yang berada dalam naungan Diknas yang sudah otonomi, diharapkan mampu meningkatkan semangat kompetisi berprestasi, dan aktualisasi diri lulusannya juga semakin bermakna konteks lingkungan dengan integrasi keilmuan dan kompetensinya yang utuh dan padu.

Kata Kunci: *Pesantren, sentralisasi, desentralisasi, otonomi, paradigma.*

A. Iftitah

Rendahnya kualitas bangsa Indonesia, utamanya dalam merespon budaya global mega kompetitif dewasa ini, telah sama-sama disadari sebagai biang segala kebobrokan di negeri ini sehingga perlu segera diatasi. Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara pada umumnya, telah disahkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan

*Makalah pernah disampaikan pada Seminar Sehari "Reposisi Lembaga Pendidikan Islam di era Otonomi Pendidikan" SEMA Fak Tarbiyah ISID PM Gontor, 27 Juli 2005

**Dekan Fak Tarbiyah IKAHA Jombang

daerah yang populer disebut otonomi daerah. Intinya, bahwa pemerintahan serba sentralistik selama ini terbukti tak (akan) pernah mampu memberdayakan masyarakat warga, karena hakikat sentralisasi adalah monopoli dan segala bentuk monopoli selalu berakibat matinya kreatifitas dan partisipasi.

Untuk sektor pendidikan, telah pula diterbitkan UU No. 20 tahun 2003 yang lazim dikenal dengan desentralisasi pendidikan. Intinya sama, bagaimana membangun semangat otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu kedepan manajemen pengelolaan lembaga yang serba instruksional perlu direvisi makna pendekatannya agar lebih demokratis. Keikut-sertaan masyarakat dalam memberikan jaminan akuntabilitas, di tingkat Pemda ditampung dalam wadah lembaga yang disebut Dewan Pendidikan, sementara di tingkat lembaga disebut Komite Sekolah atau Komite Madrasah. Begitu pula jaminan mutu atas pelaksanaannya di lapangan juga telah diterbitkan aturan dasarnya, yang didalamnya bahkan juga tercantum standar internasional yang ditetapkan.

Pada sisi lain, berdasar pengalaman yang diyakini, masyarakat pesantren banyak yang memilih caranya sendiri dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikannya. Tidak terkesan reaktif emosional isolatif sebagaimana pada zaman penjajahan atau di awal kemerdekaan dahulu, tapi lebih bersifat akomodatif bervisi kedepan. Artinya, sebagai representasi lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, institusi pesantren sudah bukan zamannya lagi kalau misi yang diembannya cuma dipahami sebatas proteksi diri dan pewarisan tradisi. Sehingga lulusan yang diharapkan nantinya juga tidak cuma berperan sebagai penonton pada setiap perhelatan nasional, hadir di pinggir atau paling *banter* tampil diakhir upacara untuk mengamini semua keputusan. Misi pesantren tentunya, disamping sebagai lembaga dakwah, terutama adalah juga untuk pemberdayaan umat pada umumnya melalui pengembangan potensi diri menuju keunggulan masing-masing pribadi.

Maka kalau saat ini muncul dimana-mana sekolah baru yang berlabel *Islam terpadu* atau *unggulan* yang mirip (berada di lingkungan) pesantren dengan kelebihanannya masing-masing, semua itu tidak lain adalah upaya peningkatan layanan mutu pendidikan Islam yang lebih segar sesuai dengan tuntutan otonomi. Ruh pendidikannya tetap tak jauh berbeda, kalau tidak disebut sama, dengan jiwa pesantren yang *open minded* mengarah pada *kemandirian partisipatif*. Standar sarana-

prasarananya juga tak beda, yaitu sekolah berasrama atau *boarding school*. Begitu pula nilai produk yang dikedepankan juga sama, yakni keunggulan kompetensi diri dan bukan pada ijazah formalnya. Dalam konteks demikian, Gontor memang lain karena seakan lahir mendahului zamannya.

B. Paradigma baru Pendidikan Nasional

Dalam penyelenggaraan pendidikan kedepan, ada enam prinsip yang perlu diacu, yaitu: (1) demokratis berkeadilan, (2) terbuka dan multi makna, (3) proses pemberdayaan dan pembudayaan sepanjang hayat, (4) keteladanan, kemauan dan kreatifitas, (5) budaya calistung, dan (6) partisipasi lingkungan dalam pengendalian mutu. Secara intrinsik, prinsip-prinsip demikian bukan barang baru lagi di lingkungan pesantren. Karena pada dasarnya, makna dari perubahan USPN 1989 yang sentralistik menjadi USPN 2003 yang desentralistik itu adalah sebagai respons pemerintah terhadap tuntutan demokratisasi, HAM dan budaya global pada umumnya. Sementara di lingkungan pesantren, nilai-nilai kemanusiaan universal seperti itu yang bersumber dari ajaran Islam relatif telah menjadi tradisi.

Sasaran tidak langsung diundangkannya prinsip-prinsip tersebut diatas adalah untuk merubah sikap para penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti sekolah dan madrasah, termasuk para pejabat dan pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan, yang selama ini cenderung monopoli dan mau benar sendiri. Dengan adanya keseimbangan antara pusat dan daerah, serta distribusi kewenangan dalam penyelenggaraan lembaga secara adil dan merata, partisipasi seluruh warga lembaga (*stakeholders*) niscaya dapat ditingkatkan.

Untuk itu, terkait dengan upaya-upaya membangun peran aktif masyarakat warga, merubah kebiasaan tunggu bola menjadi keberanian jemput bola, kesiapan mengganti tradisi serba seragam menjadi budaya bisa menerima dan menghargai keberagaman, disamping juga untuk terus meningkatkan stabilitas, dinamika dan keharmonisan kerja lembaga, pemerintah mendorong diberlakukannya sistem baru dalam pengelolaan lembaga pendidikan, yang dikenal dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Teoritik, karakteristik dari model manajemen ini, adalah: (1) fokus pada mutu, (2) *bottom-up planning and decision-making*, (3) transparansi manajerial, (4) pemberdayaan masyarakat warga, dan (5) peningkatan mutu berkelanjutan.

Pendekatan baru dalam pengelolaan lembaga tersebut sudah barang tentu harus diikuti oleh para guru, sehingga benar-benar menjiwai dalam proses belajar-mengajarnya. Oleh karena itu, guru juga diharap paham betul prinsip-prinsip CTL (*Contextual Teaching and Learning*), agar pengembangan penalaran anak tidak lepas konteks, yang jadinya tanpa makna. Guru juga perlu membekali diri dengan teori-teori *entertain education*, seperti *quantum* misalnya, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menggairahkan. Dan guru tentunya juga harus menguasai konsep dasar MI (*Multiple Intelligence*) serta tehnik pengembangannya agar tidak salah langkah atau salah arah. Ibaratnya, jangan sampai terjadi anak elang dilatih berenang, ayam jago justru dipaksa terbang.

Apalagi arti belajar untuk sekarang ini bukan sekedar *learning how to know*, tapi juga *learning how to do*, *how to be*, dan *how to live together*. Karena untuk menjalani kehidupan kedepan, nilai keunggulan seseorang itu tidak lagi diukur dari sisi pengetahuannya semata tapi lebih dari tingkat kemampuan atau kompetensi yang dikuasai. Dalam bahasa filsafat, tesis *cogito ergo sum* memang sudah lama digantikan oleh dalil *possum ergo sum*. Oleh karena itu tugas utama pendidikan abad ini, ditinjau dari aspek kompetensi, adalah memfasilitasi terciptanya manusia-manusia unggul yang memiliki kemampuan: (1) berfikir positif, kreatif dan produktif, (2) peduli masalah dan tahu pemecahannya, (3) berani ambil keputusan dan cari solusi tindak lanjutnya, (4) *learning how to learn*, (5) berkolaborasi, serta (6) pengendalian diri.

Berdasar pertimbangan-pertimbangan inilah, pemerintah menetapkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan lembaga sekolah yang disebut *School Based Management*, sementara dalam proses pembelajarannya disebut *Competency Based Education* yang terjemahannya menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dan kiranya sekali lagi perlu ditegaskan bahwa prinsip-prinsip demikian di lingkungan pesantren bukan barang baru lagi. Tinggal bagaimana kreatifitas para *asatidz* dan kesepakatan *stakeholders* warga pesantren pada umumnya untuk mencari titik-titik temu antara makna baru pendidikan nasional tersebut untuk dipadu dengan nilai-nilai luhur pesantren yang telah membudaya. Sehingga proses pendidikannya tetap stabil, harmonis tanpa kehilangan makna, tapi juga lebih dinamis tanpa banyak sengketa.

Aturan paling baru yang diterbitkan pemerintah adalah PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjelasan pasal 35 USPN tahun 2003. Dalam rangka memberi jaminan mutu yang berkelanjutan, cakupan SNP meliputi: *standar isi*, tentang kurikulum dan pengembangannya, *standar proses*, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pelaporan serta tindak lanjut proses pembelajaran, *standar kompetensi lulusan*, tentang persyaratan guru dan tenaga kependidikan serta ketentuan ratio pendidik terhadap peserta didik, *standar pembiayaan*, terkait dengan investasi, biaya operasional dan personal, *standar penilaian pendidikan*, tentang penilaian hasil belajar dan kelulusan, *standar sarana prasarana*, terkait dengan akses kelengkapan layanan pendidikan yang harus tersedia, dan *standar pengelolaan*, tentang penerapan MBS atau MBM dan rencana kerja tahunan.

Sudah barang tentu terbitnya PP demikian tidak perlu dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk mengembalikan keseragaman dan monopoli yang pernah dimiliki. Karena makna standar hanyalah berarti ukuran, patokan, tingkat keunggulan, norma atau prosedur baku. Begitu pula makna mutu dalam konteks penyelenggaraan lembaga tak perlu pula dipahami secara hitam-putih mutlak-mutlakan. Oleh karena itu, kepada semua pelaku pendidikan, khususnya warga lembaga bersama masyarakat lingkungan, diharap mampu membangun kesepahaman mengenai standar mutu yang diunggulkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga monitoring dan evaluasinya, meski dalam tugas operasional masing-masing berbeda. Budaya *think globally act locally*, itulah target yang menjadi sasaran PP. 19 diatas.

C. Dari Stabilitas Mekanis menuju Dinamika Organik

Teori pendidikan dulu menegaskan bahwa manusia itu produk lingkungan, persis sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan *al-insan ibn awaidihi*. Kini kecenderungannya berbalik, bukan manusia produk lingkungan yang ditekankan, tapi manusia sebagai pencipta budaya. Sehingga bukan masyarakat warga yang cuma bisa dipimpin yang harus diproses dan diproduksi, tapi yang lebih utama adalah juga warga yang bisa memimpin. Mau dipimpin mampu memimpin.

Cara pandang kependidikan era global abad 21 sekarang ini nampaknya telah mengalami perubahan secara mendasar. Kalau dulu aktifitas anak di kelas itu sangat terbatas, semua dilarang kecuali yang

boleh, kini aktifitas dan kreatifitas anak justru difasilitasi dan diarahkan pengembangannya. Kalau dulu *mengoreksi* itu selalu disalah-pahami sebagai *menyalahkan*, kini istilah itu dikembalikan pada makna dasarnya *membenarkan*. Dan kalau dulu anak pendiam tanpa kegiatan itu yang dipujikan, kini sebaliknya kompetensi pribadi yang jadi ukuran prestasi. Keseragaman yang serba pasti mulai berani ditinggalkan, keberagaman yang serba mungkin terus dibudayakan.

Fenomena demikian juga telah merasuki wilayah pemikiran keberagamaan kaum santri. Kalau dulu *nahy munkar* selalu diprioritaskan, kini *amr ma'ruf* yang dikedepankan. Karena *ayat*-nya memang berbunyi seperti itu. Begitu pula dalam berdakwah, berita gembira (*basyira*) yang kini dijadikan tesis utama, sementara bentuk-bentuk peringatan atau ancaman (*nadzira*) sekedar antitesisnya. Kaum santri pada umumnya kini sadar betul bahwa fungsi dakwah yang dilakukan masyarakat warga akan lebih dapat diterima oleh lingkungan manakala fokus garapannya pada upaya-upaya peningkatan budaya, dari yang kurang baik agar menjadi lebih baik, dari yang kurang terpuji menjadi lebih terpuji. Tehnik pendekatannya pun melalui pembiasaan perilaku utama, dengan keyakinan *inna al-hasanat yudzhibna al-sayyiat*. Sedang tugas memberantas kejahatan dan pelanggaran hukum pada umumnya, yang selalu butuh ancaman dan paksaan, menjadi wewenang polisi.

Namun begitu, masih ada saja kelompok-kelompok Islam yang pola pikirnya hitam-putih serba mutlak, dan kerjanya cuma bisa melarang. Ironisnya, mereka seringkali dipandang mewakili kelompok Islam paling murni, *jundullah* atau tentara Tuhan. Tapi nyatanya, bukan *salam*, *rahmah* dan *berkah*-Nya yang dihadirkan, melainkan sebaliknya justru menebar kecemasan. Kasihan memang orang-orang Islam yang berpaham demikian, dan lebih kasihan lagi kalau mereka ada yang berasal dari lulusan pesantren. Pemikirannya terjebak pada masa lampau yang serba pasti, orientasinya hanya pada yang (dikira) *mutlak*, sehingga semua langkah usahanya terpusat pada pertahanan diri atau proteksi diri. Budaya global memang serba belum pasti. Maka, *tanpa kemampuan kompetensi dan kemandirian partisipasi, segala yang mestinya mungkin akan jadi ketidak-pastian yang mengerikan*. Dan lazim secara psikologis, mereka yang menderita kecemasan dan mengalami ketidak-pastian akan eksistensi dirinya, untuk menutupinya, di-*sublimir* dan dikemas dalam bahasa agama.

Maka kembali pada pola pendidikan pesantren, yang oleh para ilmuwan diakui sebagai model pendidikan paling baku khas Indonesia, para santri yang dalam kesehariannya dididik hidup mandiri, sederhana dan penuh keterbukaan serta kebebasan, setelah dewasa nantinya diharap menjadi anggota masyarakat yang mandiri pula. Optimis memandang dirinya, *husnudzdzan* pada yang lain, tampil hidup untuk memberi dan bukan meminta, serta bermanfaat bagi sesama. Sebagaimana keikhlasan beramal yang dicontohkan oleh para Kiainya, kerja keras, *qanaah*, penuh rasa syukur, hidupnya tenteram dan *istiqamah*, sebelum tergoda syahwat politik.

Dan karena fokus garapannya mencetak watak membangun karakter, pesantren sejak awal sangat serius mensinergikan pengembangan potensi diri para santri secara utuh optimal, baik kognitif, afektif maupun motoriknya, atau yang kini lebih dikenal dengan istilah IQ, EQ dan SQ. Santri pada umumnya dididik untuk *tahu banyak dalam sedikit hal, bukan tahu sedikit dalam banyak hal*. Sehingga penguasaan ilmunya benar-benar tuntas, *malakah* atau *mastered*. Persis sebagaimana pendidikan yang dilakukan di negara-negara maju saat ini.

Hal itu demikian, karena *way of thinking* yang mendasari madzhab dunia keilmuan saat ini dan kedepan, khususnya ilmu kependidikan, bukan lagi logika kausalitas sebab-akibat yang serba mekanis, tapi prinsip-prinsip relativitas dialektis yang berpijak pada teori fisika organis, yang meliputi: (1) *prinsip interdependensi*, bahwa semua makhluk hidup itu berkembang bersama lingkungan, (2) *prinsip diferensiasi*, bahwa masing-masing individu itu punya potensi keunggulan berbeda, dan (3) *prinsip organisasi diri*, bahwa setiap pribadi itu tanpa henti akan terus merekonstruksi diri. Maka kalau diantara dogma-dogma agama kita, atau tradisi pendidikan yang kita jalani selama ini, ternyata masih banyak tersisa pengaruh doktrin fisika *un-organis* yang cenderung mematikan kreativitas, tugas kita juga mestinya untuk pandai-pandai mencari solusinya.

D. Ikhtitam

Untuk menjalani tugas kemasyarakatan nantinya, sudah semestinya kalau para lulusan pesantren itu punya komitmen kuat pada prinsip kesucian, militansi tak kenal menyerah dalam menegakkan kebenaran, serta disiplin diri tinggi dalam menempuh jalan keutamaan. Kuncinya, sebagaimana pokok-pokok ajaran agama kita, pertama *iman*

dan percaya diri dalam partisipasi. Kedua *islam* dan menerima kenyataan tanpa banyak curiga. Ketiga *ihsan* selalu berkreasi melalui bermacam kombinasi. Itulah mungkin makna lain yang terkandung dalam amanat suci (QS. 5:35) yang menegaskan bahwa sukses hidup itu saratnya ada tiga, *taqwa Allah*, tak henti cari solusi, dan *mujahadah fi sabilih*.

Maka kalau banyak kaum santri saat ini yang lebih memilih pengembangan lembaganya melalui jalur *sekolah*, bukan sebatas *madrasah*, alasannya sederhana. Karena Departemen Agama yang resmi jadi payungnya, menurut perundangan yang berlaku, memang dirancang sebagai salah satu departemen yang tidak termasuk wilayah otonomi. Sehingga dengan melalui jalur Diknas yang sudah otonomi, semangat kompetisi berprestasi diharap dapat semakin ditingkatkan, aktualisasi diri lulusannya juga semakin bermakna konteks lingkungan, begitu pula integrasi keilmuan dan kompetensinya yang utuh dan padu. Sama seperti halnya semangat yang menjwai sejumlah IAIN dan STAIN yang kini berubah wajah menjadi UIN.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin (et.al), *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta, SUKA Press, 2003.
- Abou el-Fadl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Johnson, Elaine B., *Contextual Teaching and Learning*, California, Corwin Press Inc., 2002.
- Mudjahid AK dan Achmad Syahid, (ed.), *Memelihara Tradisi Merayakan Inovasi; 25 Tahun Puslitbang Agama dan Keagamaan*, Jakarta, Departemen Agama, 2003.
- Peraturan Pemerintah, No. 19/2005, tentang: *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, Balitbang Diknas, 2005.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, London, Kogan Page, 1993.
- Sumpeno, Ahmad, (ed.), *Pembelajaran Pesantren, Suatu Kajian Komparatif*, Jakarta, Departemen Agama, 2002.
- Stoltz, Paul G., *Adversity Quotient; Mengubah Hambatan Menjadi Peluang*, ter. T. Hermaya, Jakarta, Gramedia, 2000.
- Undang-undang, No. 20/2003 tentang: *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Dharma Bhakti, 2003.